

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dolar Amerika Serikat telah menjadi aspek penting dalam dinamika hubungan internasional yang memengaruhi dinamika geopolitik, kebijakan ekonomi, hingga perdagangan global. Posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan tekanan ekonomi dan pengaruh politik yang dapat membentuk perilaku negara lain. Supremasi dolar Amerika Serikat tersebut tidak terlepas dari faktor historis pasca Perang Dunia II dengan munculnya sistem Bretton Woods yang menjadikannya mata uang utama dalam perdagangan dan keuangan internasional (Rao, 2024). Sebelum sistem Bretton Woods muncul, negara-negara di dunia menggunakan emas sebagai sistem nilai tukar tunggal, namun banyak negara yang kemudian mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat cadangan emas yang menipis akibat perang (Saragih, 2016). Amerika Serikat kemudian menawarkan dolar sebagai mata uang jangkar dalam perdagangan antarnegara dengan jaminan setiap 35 dolar Amerika Serikat dapat ditukar dengan satu ons emas. Jaminan tersebut kemudian mulai membangun kepercayaan dunia internasional terhadap dolar Amerika Serikat.

Konferensi Bretton Woods tahun 1944 yang kemudian melahirkan hasil berupa perjanjian Bretton Woods resmi menetapkan Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global, menggantikan dominasi emas dan poundsterling. Keputusan dari konferensi Bretton Woods ini merupakan bagian dari strategi terencana oleh Dewan Hubungan Luar Negeri dan Departemen Luar

Negeri Amerika Serikat, yang menyadari bahwa menjadikan dolar sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional akan memperkuat posisi ekonomi dan politik Amerika Serikat. Dominasi dolar kemudian semakin terkonsolidasi pada dekade 1970-an dengan lahirnya sistem yang disebut petrodolar, yaitu ketika perdagangan minyak dunia secara eksklusif dilakukan dalam denominasi dolar sebagai hasil dari kesepakatan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Selain itu, pembentukan International Monetary Fund dan World Bank yang beroperasi dengan basis dolar turut memperkuat peran mata uang Amerika Serikat ini dalam sistem moneter internasional. Permintaan global yang terus berlanjut terhadap dolar juga telah memungkinkan Amerika Serikat untuk menjalankan defisit fiskal tanpa mengalami tekanan nilai tukar yang signifikan, sehingga menjadikan dolar tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga simbol dominasi ekonomi global (Costigan dkk., 2017).

Setelah sistem Bretton Woods runtuh pada tahun 1970-an, dunia internasional masih percaya pada dolar Amerika Serikat dan hal tersebut menjadikan dolar tetap menjadi acuan dalam pertukaran mata uang antarnegara (Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2023). Peran dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama dalam perdagangan antarnegara di dunia telah dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menegakkan sanksi keuangan untuk mengisolasi aktor asing. Hal tersebut ikut menciptakan risiko politik bagi negara-negara yang bergantung pada transaksi dolar (Yang, 2023). Berdasarkan data dari tahun 2000 hingga 2021, Amerika Serikat melalui dominasi dolar telah mempengaruhi tata kelola global melalui pemberian sanksi ekonomi

yang meningkat sepuluh kali lipat dalam kurun waktu tersebut (Buckley & Trzecinski, 2023). Selain perihal sanksi ekonomi, dominasi dolar dalam dunia internasional juga telah membuat Amerika Serikat memasukkan diplomasi dolar sebagai salah satu kebijakan luar negeri mereka yang akan mengarahkan pengaruh ekonomi, membentuk hubungan global melalui pinjaman, dan investasi. Dominasi ini dapat membatasi ekonomi negara lain dan berujung pada terciptanya ketergantungan. Status dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dunia yang menimbulkan ketergantungan telah mendorong negara-negara lain di dunia untuk membangun alternatif melawan dominasi dolar Amerika Serikat seperti yang terlihat dalam inisiatif Tiongkok dan Eropa untuk melewati ketergantungan terhadap dolar (Zoffer, 2019).

Salah satu aktor penting yang muncul dalam upaya menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat adalah aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), yang kini telah diperluas mencakup negara-negara lain. BRICS telah berkembang menjadi aktor berpengaruh dalam perekonomian dan geopolitik global, dengan negara-negara anggotanya secara kolektif menyumbang sekitar 41,5% dari populasi dunia dan 26,7% dari luas daratannya. Angka ini mencerminkan skala kekuatan BRICS, didukung oleh kekuatan ekonomi, geopolitik, dan militer dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan India. Kelompok ini memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan baru terhadap hegemoni Barat dan membangun kerja sama strategis dengan negara-negara yang memiliki visi serupa. Dengan kekuatan geopolitik, ekonomi, dan militer yang dimiliki negara anggotanya tidak hanya menambah kekuatan serta

pengaruh BRICS sebagai aliansi yang diperhitungkan, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih multipolar dan inklusif melalui berbagai kerja sama yang dilakukan antar mereka sebagai sesama anggota BRICS maupun kepada negara-negara diluar BRICS yang memiliki visi dan misi yang serupa dengan yang dibawakan oleh BRICS. Ekspansi yang dilakukan BRICS, termasuk penerimaan negara anggota baru telah terbukti meningkatkan pengaruh geopolitik dan memposisikannya sebagai penyeimbang lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang didominasi Barat (Gavrilenko & Shenshin, 2024).

Ekspansi tersebut dipicu oleh keinginan menghadapi dominasi dolar dalam dunia internasional serta meningkatkan kedaulatan ekonomi masing-masing anggota. Perluasan keanggotaan BRICS dengan bergabungnya negara-negara seperti Ethiopia, Arab Saudi, Mesir, UEA Iran, hingga Indonesia telah merepresentasikan langkah strategis BRICS untuk mendiversifikasi kekuatan ekonomi dan geopolitik, serta mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Keinginan akan terciptanya otonomi ekonomi, strategi geopolitik untuk melindungi diri dari volatilitas dolar, serta upaya membentuk tatanan perdagangan global yang lebih multipolar, telah menjadi indikator bahwa dedolarisasi bukan sekadar narasi yang dikonstruksi oleh Barat, melainkan merupakan pilihan strategis yang diambil oleh negara-negara BRICS (Lee & Sims, 2024). Dengan membawa paradigma baru, BRICS memiliki tujuan untuk memberdayakan gerakan pembebasan di negara-negara berkembang dan mempromosikan kerangka ekonomi yang lebih adil dibandingkan kerangka

ekonomi yang ditawarkan oleh Barat. Paradigma baru yang digagas dan ditawarkan oleh BRICS ini meskipun menghadapi berbagai tantangan, diharapkan dapat mendefinisikan kembali interaksi keuangan global, serta menawarkan alternatif untuk melawan hegemoni dolar Amerika Serikat dan sistem keuangan tradisional Barat pada umumnya (Arnold, 2024).

Inisiatif BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat tercermin dalam berbagai langkah konkret, seperti penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral antar anggota, pendirian dan penguatan lembaga keuangan alternatif seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA). Negara seperti Tiongkok mendorong internasionalisasi yuan, Brasil menggunakan real dalam perdagangan dengan Argentina dan Tiongkok, sementara India mendorong penggunaan rupee dalam transaksi regional. Strategi-strategi tersebut menandakan adanya konsolidasi kekuatan ekonomi yang tidak hanya berupaya memperkuat kedaulatan finansial masing-masing negara, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam hubungan keuangan global yang lebih multipolar dan inklusif. Dengan membawa paradigma baru, BRICS bertujuan mendefinisikan ulang sistem keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem tradisional berbasis dominasi dolar Amerika Serikat. Meskipun menghadapi tantangan dari segi teknis, geopolitik, dan ekonomi internal masing-masing negara, kerja sama BRICS tetap membuka peluang untuk menciptakan tatanan dunia baru yang lebih setara.

Oleh karena itu, meskipun upaya BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat masih menghadapi berbagai tantangan, kerja sama ini

membuka peluang untuk menciptakan paradigma baru dalam dunia internasional yang lebih inklusif dan multipolar. BRICS, melalui kolaborasi anggotanya, telah menunjukkan potensi untuk mendefinisikan ulang kondisi ekonomi politik internasional, terutama melalui strategi bersama yang bertujuan mengurangi ketergantungan global terhadap dolar. Melalui analisis latar belakang yang telah diuraikan, pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengisi celah pengetahuan yang ada, khususnya dalam memahami strategi kolektif BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai secara kritis berbagai langkah yang dilakukan negara-negara anggota BRICS dalam mendorong proses dedolarisasi, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pembentukan lembaga keuangan alternatif, dan inisiatif kolaboratif lainnya.

Dengan kerangka kerja yang telah dirancang secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi langkah-langkah analitis yang akan dilakukan, sekaligus mendorong upaya pencarian solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap tantangan yang dihadapi oleh BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kerja sama kolektif antara anggota BRICS dapat memengaruhi tatanan ekonomi global di tengah konteks geopolitik yang terus berubah, seperti penerapan sanksi ekonomi, ketegangan antara Barat dan Timur, serta transformasi ekonomi digital dan teknologi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya akan memperkaya literatur akademis mengenai dedolarisasi dan multipolaritas, tetapi juga memberikan

rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas dampak kerja sama BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat, dengan fokus pada persoalan perdagangan internasional. Penelitian ini juga akan membatasi analisis pada dampak kerja sama BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat, dengan fokus pada strategi dan implikasi kerja sama tersebut terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional?
- b. Bagaimana implikasi kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Mengelaborasi strategi BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

- b. Menelaah implikasi kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dalam literatur hubungan internasional, khususnya mengenai peran kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat kerja sama multilateral seperti yang dilakukan institusi internasional seperti BRICS untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua konsep yaitu kerja sama multilateral dan dedolarisasi. Kedua konsep tersebut akan digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang melibatkan lebih dari dua pihak dengan tujuan utama untuk mencapai kepentingan bersama melalui mekanisme kolektif. Dalam kaitannya dengan BRICS, kerja sama tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga bersifat lebih luas pada aspek ekonomi dan keuangan yang diwujudkan melalui hadirnya lembaga dan forum bersama seperti NDB dan CRA. Melalui kerja sama multilateral, negara-negara

anggota BRICS berupaya menghadapi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat yang selama ini telah mendominasi sistem perdagangan internasional. Pendekatan kolektif yang dibawa oleh BRICS ini memungkinkan mereka untuk membentuk posisi tawar yang lebih kuat dalam tatanan ekonomi global.

Kerja sama multilateral dalam BRICS juga mencerminkan prinsip-prinsip paradigma liberalisme, yang menekankan pentingnya institusi dan kerja sama internasional untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama. Terkait hal ini, BRICS sebagai sebuah aliansi negara berkembang telah menginisiasi bentuk kerja sama yang tidak eksklusif, melainkan inklusif dengan tujuan mengatasi tantangan global. Kerja sama yang bersifat multilateral ini memungkinkan setiap anggota BRICS untuk mengelola risiko ekonomi dan finansial yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat secara lebih efektif melalui koordinasi kebijakan dan pembagian sumber daya.

Secara praktis, kerja sama multilateral BRICS direalisasikan dalam berbagai bentuk program dan kebijakan kolektif yang melibatkan koordinasi antaranggota dalam bidang perdagangan, keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Contoh perwujudan tersebut adalah dibentuknya New Development Bank pada tahun 2014 dengan tujuan mendukung pembiayaan infrastruktur dan proyek pembangunan ekonomi berkelanjutan setiap anggota BRICS melalui pembiayaan proyek strategis yang bersifat regional maupun global (Stojkovic, 2016). Selain pembentukan Bank Pembangunan Baru tersebut, BRICS juga berinisiatif untuk menciptakan sebuah sistem pembayaran independen bernama BRICS Pay yang mengacu pada potensi pengembangan sistem pembayaran digital

terpadu dalam transaksi lintas negara masing-masing anggota BRICS. BRICS Pay ini diharapkan dapat merampingkan perdagangan dengan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan sekaligus menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat, hal ini akan menurunkan biaya transaksi dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekspor negara-negara anggota BRICS (Khmelevskaya, 2015). Dua contoh inisiatif tersebut menunjukkan tekad BRICS dalam melakukan kerja sama multilateral untuk kemudian menjadi strategi praktis menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat.

Terkait rumusan masalah penelitian pertama dalam penelitian ini, konsep kerja sama multilateral menyediakan kerangka untuk memahami strategi BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat. Melalui institusi dan mekanisme kekuatan kolektif, BRICS diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan bersama yang mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memperkuat posisi tawar dari masing-masing negara anggotanya dalam perdagangan internasional. Dengan konsep kerja sama multilateral ini, dominasi dolar Amerika Serikat tidak diperlakukan sebagai sebuah tantangan besar yang harus dilawan secara unilateral, melainkan sebagai sebuah masalah global yang membutuhkan solusi bersama dari setiap negara yang merasa dirugikan dengan berdasarkan pada prinsip kerja sama dan saling ketergantungan ekonomi.

Konsep kerja sama multilateral ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini yang akan menggambarkan BRICS dalam berorganisasi dan menjalankan strategi kolektifnya untuk menghadapi dominasi dolar Amerika

Serikat dalam perdagangan internasional. Konsep ini tidak hanya relevan sebagai strategi politik maupun ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari paradigma liberalisme yang mengedepankan pentingnya sebuah institusi dan kerja sama dalam meraih tujuan bersama.

2. Soft Balancing

Dalam penelitian ini, konsep soft balancing digunakan untuk menjelaskan strategi kolektif yang dilakukan oleh negara-negara BRICS dan implikasinya dalam menghadapi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat, tanpa menggunakan kekuatan militer. Soft balancing merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara untuk membatasi pengaruh kekuatan dominan melalui cara-cara non-militer, seperti kerja sama diplomatik, pembentukan lembaga alternatif, serta penguatan hubungan kerja sama ekonomi. Soft balancing juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan atau kebijakan agresif suatu negara dengan memanfaatkan institusi internasional, diplomasi bersama dalam bentuk kesepakatan informal, serta tekanan ekonomi agar tindakan negara tersebut menjadi tidak sah dan sulit untuk dicapai (Paul, 2005).

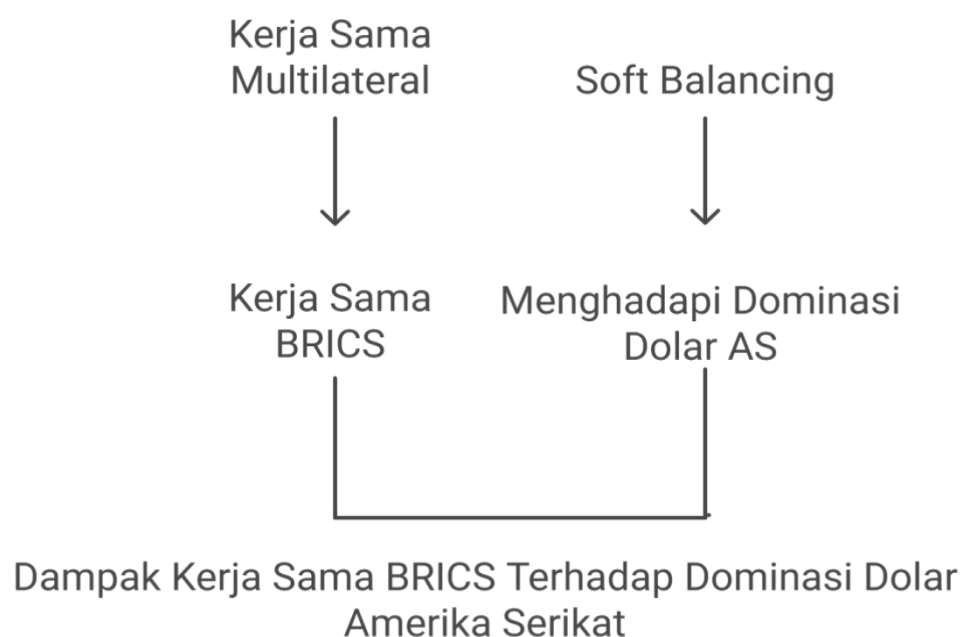
Dalam konteks kerja sama BRICS, strategi ini tampak dalam pendirian lembaga-lembaga seperti New Development Bank, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara anggota, serta pengembangan pembayaran bersama seperti BRICS Pay. BRICS merupakan salah satu contoh dari koalisi soft balancing, di mana negara-negara anggotanya membentuk kerja sama yang berpusat pada lembaga informal untuk menghasilkan hasil-hasil penyeimbangan

yang efektif (Papa & Han, 2025). Selain itu, soft balancing juga merupakan strategi yang biasa digunakan oleh negara-negara yang tidak dominan untuk menunda dan menggagalkan kebijakan negara hegemon dengan cara meningkatkan biaya politik dan ekonomi dari tindakan tersebut (Papageogiou, Eslami, dan Duarte, 2023). Dalam hal ini, dominasi dolar Amerika Serikat sebagai alat kekuasaan global berusaha dihadapi oleh BRICS melalui kerja sama ekonomi, penguatan institusi keuangan, dan diplomasi bersama.

Strategi soft balancing yang dilakukan oleh BRICS juga mencerminkan upaya negara-negara berkembang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi mereka di tengah ketidaksetaraan sistem keuangan global yang didominasi oleh negara maju, terutama Amerika Serikat. Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, tetapi juga membuat mereka mendapatkan kebijakan sepihak seperti sanksi ekonomi. Melalui pendekatan soft balancing, BRICS berusaha menciptakan ruang manuver yang lebih otonom dengan membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan multipolar. Selain itu, konsep soft balancing juga merefleksikan perubahan dalam dinamika kekuasaan global, di mana kekuatan ekonomi dan diplomatik mulai digunakan sebagai alat utama dalam kompetisi antarnegara. Dalam hal ini, BRICS bukan hanya bertujuan untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat secara teknis, melainkan juga untuk menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi dunia dapat dijalankan melalui kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Dengan menjadikan soft balancing sebagai kerangka konseptual, penelitian ini berupaya memahami bahwa

resistensi terhadap dominasi dolar Amerika Serikat bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari strategi geopolitik kolektif negara-negara berkembang dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

Oleh karena itu, konsep soft balancing dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kerja sama multilateral BRICS menjadi strategi kolektif yang bertujuan untuk menghadapi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan membentuk sistem keuangan internasional alternatif yang lebih seimbang, adil, dan tidak terpusat pada satu negara saja.



Made with  Napkin

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena secara detail dan mendalam, seperti yang diuraikan dalam artikel berjudul "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" yang ditulis oleh Dr. Wahidmurni, M.Pd pada tahun 2017 “Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, maupun penggalian dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan mendalam dan menyeluruh tentang dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk jenis data sekunder tersebut akan diambil dari sumber tidak langsung, misalnya melalui dokumen, arsip, atau laporan yang telah tersedia (Sugiyono, 2018). Jenis data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran umum tentang kerja sama BRICS yang kemudian akan dianalisis implikasinya terhadap dominasi dolar Amerika Serikat oleh peneliti dalam bagian hasil dan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Menurut Nazir (2013), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan pada sebuah masalah. Studi pustaka dalam penelitian ini didapatkan atas kajian teoretis dari beberapa referensi ilmiah berupa buku, artikel, arsip, dan dokumen. Data juga diperoleh dari sumber non ilmiah tetapi masih berkaitan dengan persoalan yang diangkat seperti berita online, surat kabar, laporan, tulisan media sosial, gambar ataupun video. Peneliti berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari sumber sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dianalisis oleh peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif yang terbagi ke dalam beberapa tahapan untuk menjelaskan dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (1994). Teknik analisis tersebut secara umum diuraikan sebagai berikut.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan atas apa yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka dipilih dan disederhanakan dengan

memilih yang berkaitan dengan dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat untuk memudahkan peneliti pada tahapan berikutnya.

b. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahapan ini, data yang telah diklasifikasikan atau di-code disajikan dalam bentuk tulisan ataupun kata-kata sehingga dapat menggambarkan dominasi dolar Amerika Serikat dalam dunia internasional serta adanya kerja sama antar sesama negara anggota BRICS yang kemudian bertujuan untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Peneliti membuat secara naratif dari data yang didapatkan untuk memudahkan pemahaman atas data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap akhir ini, peneliti merumuskan makna dari hasil riset yang telah diperoleh. Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk mengungkapkan hasil riset dengan kalimat yang singkat serta mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung setelah data terkumpul cukup memadai yang kemudian diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap, diambil kesimpulan akhir yang menggambarkan strategi kerja sama BRICS dan menguraikan implikasi dari kerja sama BRICS terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

F. RANCANGAN KOMPOSISI BAB

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang. Berisikan urgensi penelitian dari topik yang diangkat oleh peneliti mengenai dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat

B. Batasan dan rumusan masalah. Membahas mengenai batasan penelitian pada dampak kerja sama BRICS dalam menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat, dengan fokus pada strategi dan implikasi kerja sama tersebut terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Rumusan masalahnya fokus pada masalah strategi dan implikasi dari kerja sama BRICS untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

C. Tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tujuan dari penelitian ini yang tidak lain untuk menjawab kedua rumusan masalah yang diangkat. Manfaat penelitian mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika kerja sama BRICS serta memperkaya literatur studi ilmu hubungan internasional.

D. Kerangka konseptual. Pada bagian ini dijelaskan penggunaan konsep kerja sama multilateral untuk menganalisis strategi kerja sama BRICS, serta konsep soft balancing untuk mengidentifikasi implikasi BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

E. Metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pendekatan serta metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis data penelitian.

F. Rancangan komposisi bab. Bagian ini berisi penjelasan mengenai komposisi, struktur, dan deskripsi setiap bab yang ada dalam skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja sama multilateral. Pada bagian ini berisi penjelasan menyeluruh mengenai kerja sama multilateral yang fokus pada definisi, relevansinya dalam konteks BRICS.

B. Soft balancing. Pada bagian ini dijelaskan mengenai definisi, relevansinya dengan implikasi kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat.

C. Penelitian terdahulu. Bagian ini berisi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini dan telah menjelaskan mengenai dampak kerja sama BRICS secara kolektif terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

BAB 3 GAMBARAN UMUM

A. Dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional. Pada bagian ini dijelaskan sejarah sistem Bretton Woods, hegemoni dolar dalam perdagangan internasional, hingga ketergantungan global terhadap dolar Amerika Serikat dan efeknya bagi negara-negara berkembang termasuk BRICS.

B. BRICS sebagai aliansi multilateral. Pada bagian ini dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya BRICS, perkembangan institusional BRICS dalam bidang ekonomi dan keuangan, dan inisiatif dedolarisasi BRICS.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Bagian ini menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

B. Implikasi kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Bagian ini menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERJA SAMA MULTILATERAL

Kerja sama multilateral merupakan salah satu bentuk interaksi dalam hubungan internasional yang melibatkan tiga atau lebih aktor negara dalam mencapai tujuan bersama. Keohane dan Nye (2012) mendefinisikan multilateralisme sebagai koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok tiga atau lebih negara melalui pengaturan ad hoc atau melalui institusi. Konsep multilateralisme tidak hanya mencakup aspek kuantitatif yakni jumlah aktor, tetapi juga aspek kualitatif yang menekankan pada prinsip-prinsip tertentu dalam mengatur hubungan antarnegara. Ruggie (1992) menjelaskan bahwa multilateralisme sejati harus didasarkan pada prinsip tidak dapat dibagi-bagi, tidak ada diskriminasi, dan timbal balik yang tersebar yang membedakannya dari sekadar hubungan multi-bilateral. Dalam konteks ini, kerja sama multilateral tidak hanya sekadar melibatkan negara, tetapi juga menciptakan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kerangka institusional dalam kerja sama multilateral menekankan pentingnya peran institusi internasional sebagai mekanisme yang memfasilitasi kerja sama antarnegara. Institusi ini dapat berbentuk organisasi internasional formal maupun rezim yang menetapkan norma dan aturan tertentu. Menurut Keohane (1984), institusi internasional berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan membangun kepercayaan antarnegara, sehingga memperbesar peluang tercapainya kepatuhan terhadap kesepakatan

bersama. Dengan adanya struktur dan aturan yang jelas, kerja sama multilateral menjadi lebih stabil dan dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan ketika terdapat perubahan dalam kepentingan nasional masing-masing negara.

Menurut Rüländ (2018), multilateralisme kontemporer memiliki tiga karakteristik utama, yaitu melibatkan tiga atau lebih negara, didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku, dan mengharuskan adanya keutuhan dalam hubungan antar anggota. Karakteristik ini membedakan kerja sama multilateral dengan kerja sama bilateral yang hanya melibatkan dua negara dan cenderung lebih fleksibel dalam pengaturannya. Keohane (1990) dalam teori institusionalisme liberal menekankan bahwa institusi multilateral dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi kerja sama jangka panjang antarnegara. Teori ini menjadi landasan penting mengapa negara-negara memilih pendekatan multilateral dibandingkan alternatif lainnya.

Kerja sama multilateral dapat terbentuk karena beberapa faktor utama. Pertama, adanya interdependensi yang semakin kompleks antar negara dalam era globalisasi. Kedua, munculnya tantangan-tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara individual, seperti krisis ekonomi. Ketiga, keinginan negara-negara untuk mengurangi biaya transaksi dalam berinteraksi dengan banyak negara sekaligus. Selain faktor-faktor tersebut, Martin (1992) mengidentifikasi bahwa pengurangan ketidakpastian dan peningkatan legitimasi juga menjadi motivasi penting bagi negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama multilateral. Ketidakpastian dalam lingkungan internasional mendorong negara

mencari mekanisme yang dapat memberikan prediktabilitas dalam hubungan internasional.

Dalam praktiknya, kerja sama multilateral dapat berbentuk organisasi internasional formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), atau kelompok-kelompok regional dan tematik seperti ASEAN (Association of South East Asia Nation), G20 (Group of Twenty), hingga BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa). Setiap bentuk kerja sama multilateral ini memiliki tujuan, struktur, dan mekanisme kerja yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negara-negara anggotanya. Berdasarkan tingkat institusionalisasinya, kerja sama multilateral dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, multilateralisme formal yang memiliki struktur organisasi yang jelas, aturan-aturan yang mengikat, dan mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur. Kedua, multilateralisme informal seperti forum-forum konsultasi atau dialog yang tidak memiliki struktur organisasi yang kaku, tetapi tetap efektif dalam mencapai tujuan tertentu.

Morse dan Keohane (2014) mengemukakan bahwa kerja sama multilateral memberikan beberapa keuntungan bagi negara-negara yang terlibat, antara lain:

1. Efisiensi dalam Negosiasi: Negara dapat menyelesaikan masalah dengan banyak pihak sekaligus dalam satu forum, sehingga mengurangi biaya diplomasi dan waktu yang diperlukan.
2. Legitimasi yang Lebih Besar: Keputusan yang diambil secara multilateral cenderung memiliki legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan keputusan unilateral atau bilateral.

3. Pembagian Beban: Negara-negara dapat membagi tanggung jawab dalam mengatasi masalah bersama, sehingga mengurangi beban individual masing-masing negara.

4. Akses terhadap Informasi: Kerja sama multilateral memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan mendalam antar negara anggota.

Kerja sama multilateral juga menghadapi berbagai tantangan signifikan yang meliputi perbedaan kepentingan nasional, asimetri kekuatan antar negara anggota, masalah koordinasi, dan kesulitan dalam penegakan kesepakatan. Keberhasilan kerja sama multilateral sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk mengatasi masalah *collective action* dan *free rider problem*. Masalah ini muncul ketika negara-negara cenderung mengandalkan usaha negara lain tanpa memberikan kontribusi yang sepadan, atau ketika kepentingan nasional bertentangan dengan kepentingan kolektif. Olson (195) dalam teori *collective action* menjelaskan bahwa semakin besar jumlah anggota dalam kerja sama multilateral, semakin sulit untuk mengatasi masalah *free rider* yaitu situasi di mana beberapa anggota kerja sama mendapatkan manfaat dari upaya bersama tanpa memberikan kontribusi yang sepadan atau bahkan tidak berkontribusi sama sekali. Hal ini memerlukan desain institusional yang tepat dan komitmen politik yang kuat dari negara-negara anggota.

Dalam dunia kontemporer, kerja sama multilateral mengalami evolusi dengan munculnya bentuk-bentuk baru seperti minilateralisme yang melibatkan sejumlah kecil negara dengan kepentingan yang sangat spesifik. Kahler (2019) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar

dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dibandingkan dengan multilateralisme tradisional yang melibatkan banyak negara. Fenomena minilateralisme atau *coalitions of the willing* yang merupakan kelompok negara yang secara sukarela bergabung untuk mengambil tindakan bersama dalam isu tertentu, biasanya ketika forum multilateral resmi mengalami kebuntuan atau tidak mampu mencapai konsensus, mencerminkan pragmatisme dalam diplomasi multilateral kontemporer. Naim (2009) menyebut fenomena ini sebagai minilateralisme yang dapat menjadi solusi terhadap situasi multilateral gridlock yang sering terjadi dalam forum-forum besar.

Dalam konteks ekonomi global, kerja sama multilateral menjadi semakin penting karena saling ketergantungan ekonomi antar negara yang semakin tinggi. Globalisasi ekonomi mendorong negara-negara untuk mencari mekanisme kerja sama yang dapat mengurangi volatilitas dan ketidakpastian dalam sistem ekonomi internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan berbagai forum ekonomi multilateral seperti G7 (Group of Seven), G20, dan kelompok-kelompok ekonomi regional lainnya. Kerja sama multilateral dalam bidang ekonomi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kekuatan hegemon dalam sistem internasional. Patrick (2018) berpendapat bahwa negara-negara dapat menggunakan institusi multilateral untuk membatasi dan mengontrol penggunaan kekuatan oleh negara-negara besar, sekaligus memberikan jaminan kepada negara-negara kecil bahwa kepentingan mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks BRICS juga, kerja sama multilateral sangat penting karena memungkinkan negara-negara anggota untuk secara kolektif mengatasi tantangan ekonomi, mempromosikan pembangunan dan mengimbangi dominasi Barat. Dengan membina kemitraan ekonomi dan menciptakan lembaga keuangan alternatif, BRICS meningkatkan multilateralisme diplomatik, bertujuan untuk tatanan dunia multipolar yang mendukung kepentingan negara-negara berkembang (Kraktus, 2024). Kerja sama multilateral mengacu pada kolaborasi antara tiga negara atau lebih untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks BRICS, kerja sama ini sangat penting karena mendorong dialog yang setara di antara negara-negara berkembang besar, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan melawan sanksi sepihak. Terkait kerja sama multilateral, BRICS berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kerja sama internasional, memungkinkan negara-negara anggota untuk membuat aliansi baru dan meningkatkan mekanisme yang ada, sehingga berkontribusi pada dunia multipolar dan menawarkan alternatif model tata kelola yang terpusat pada Barat (Ponomarenko, 2024).

Eichengreen (2019) menekankan bahwa tantangan terhadap dominasi mata uang tertentu dalam dunia internasional memerlukan koordinasi multilateral yang berkelanjutan dan terstruktur. Kerja sama multilateral memungkinkan BRICS untuk mengembangkan mekanisme pembayaran alternatif, transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal, dan instrumen keuangan lainnya yang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat secara kolektif. Selain itu, Cooper (2020) berpendapat bahwa dampak kerja sama multilateral terhadap

sistem moneter internasional tidak hanya bersifat ekonomis, namun juga politis. Kerja sama multilateral BRICS diharapkan dapat menciptakan legitimasi alternatif terhadap sistem yang didominasi oleh negara-negara maju, sehingga memberikan pilihan bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Helleiner (2019) menjelaskan bahwa kerja sama multilateral dalam bidang moneter mampu menciptakan efek agregasi yang dapat mengubah struktur sistem keuangan global. Dalam hal ini, BRICS sebagai kelompok multilateral memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang lebih signifikan secara kolektif dibandingkan jika negara anggotanya bertindak secara individual.

Relevansi konsep kerja sama multilateral dalam konteks BRICS semakin signifikan ketika melihat bagaimana negara-negara berkembang mencari bentuk solidaritas kolektif untuk mengatasi asimetri dalam sistem keuangan global. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi domestik, tetapi juga tekanan eksternal yang bersumber dari dominasi mata uang tunggal dan dominasi institusi keuangan global yang berorientasi pada kepentingan negara-negara Barat.

Dengan mengusung semangat kesetaraan, kerja sama multilateral dalam BRICS juga mencerminkan transformasi dari multilateralisme eksklusif ke arah yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini menjadi penting mengingat dominasi dolar Amerika Serikat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen kekuasaan politik global. Dalam hal ini, konsep kerja sama multilateral

memungkinkan BRICS menyuarakan kepentingan kolektif negara berkembang yang selama ini kurang terwakilidalam forum-forum internasional ternama.

Selain itu, kerja sama multilateral juga memberi peluang bagi negara-negara anggota BRICS untuk memanfaatkan sinergi kekuatan regional mereka untuk mendorong reformasi struktural dalam sistem moneter internasional. Konsep multilateral bukan hanya memfasilitasi pembentukan lembaga baru, tetapi juga memungkinkan terciptanya ruang negosiasi baru yang lebih setara dalam dunia internasional. Hal ini berarti bahwa multilateralisme yang dijalankan BRICS tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kolektif, tetapi juga berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami bagaimana kekuatan negara-negara berkembang dapat memengaruhi arah sisem ekonomi global secara konstruktif.

Dengan demikian, konsep kerja sama multilateral memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami bagaimana kekuatan kolektif BRICS diharapkan dapat menghasilkan dampak transformatif terhadap tatanan keuangan global yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Konsep kerja sama multilateral ini memungkinkan analisis mendalam terhadap strategi,dan implikasi inisiatif BRICS untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

B. SOFT BALANCING

Soft balancing merupakan konsep yang relatif baru dalam teori hubungan internasional yang muncul sebagai respons terhadap dinamika sistem internasional pasca Perang Dingin. Konsep soft balancing merujuk pada strategi yang

digunakan oleh negara-negara untuk membatasi kekuatan hegemonik tanpa menggunakan konfrontasi militer langsung. Robert Pape (2005) mendefinisikan soft balancing sebagai upaya negara-negara besar untuk membentuk koalisi ad hoc guna menghambat, mengecewakan, dan melemahkan kebijakan militer unilateral Amerika Serikat yang dianggap agresif, melalui instrumen-instrumen non-militer seperti diplomasi dan kekuatan ekonomi. Paul (2018) memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai konsep ini, yakni bahwa soft balancing dilakukan melalui institusi internasional, penyalarsan informal, dan sanksi ekonomi untuk menahan kekuatan yang dianggap mengancam. Kedua definisi ahli tersebut menunjukkan bahwa soft balancing berbeda secara fundamental dari strategi penyeimbangan tradisional karena tidak menggunakan kekuatan militer langsung, melainkan menggunakan instrumen diluar militer untuk membatasi kekuatan dominan dalam sistem internasional.

Konsep soft balancing pada awalnya berkembang sebagai respons terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem unipolar pasca Perang Dingin, terutama setelah invasi Irak pada tahun 2003. Konsep ini muncul untuk menjelaskan bentuk-bentuk penyeimbangan kekuatan yang tidak konvensional atau non-militer, di mana negara-negara sekunder berupaya membatasi pengaruh hegemon melalui cara-cara yang lebih halus. Pape (2005) menambahkan bahwa meskipun Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan hegemon, negara-negara lain tidak melakukan penyeimbangan militer secara langsung, melainkan memilih pendekatan diplomatik dan institusional sebagai respons terhadap

kekuatan militer Amerika Serikat yang dianggap terlalu besar untuk dilawan secara terbuka.

Soft balancing memiliki karakteristik utama yang membedakannya secara fundamental dari strategi penyeimbangan tradisional. Soft balancing tidak mengandalkan kekuatan militer langsung seperti aliansi pertahanan atau penumpukan persenjataan, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih halus namun tetap strategis. Paul (2018) menyatakan bahwa soft balancing menekankan pada penggunaan mekanisme non-militer seperti institusi internasional, koalisi informal ad hoc, dan diplomasi multilateral untuk membatasi ruang gerak kekuatan dominan. He (2008) juga menjelaskan bahwa strategi ini mencakup penggunaan sanksi ekonomi, diversifikasi perdagangan, serta penciptaan norma internasional baru yang dapat meredam tindakan unilateral negara hegemon. Brooks dan Wohlforth (2005) menegaskan bahwa soft balancing bersifat tidak konfrontatif secara langsung, namun bertujuan untuk mengurangi kebebasan bertindak kekuatan hegemon melalui legitimasi institusional. Sejalan dengan hal tersebut, Murat Yeşiltaş (2009) menekankan bahwa soft balancing memanfaatkan aset diplomatik, bukan militer, untuk melindungi kepentingan negara.

Dalam praktiknya, soft balancing banyak diwujudkan melalui kerja sama ekonomi dan diplomasi kolektif. Melalui perjanjian dagang regional, integrasi ekonomi, dan koordinasi kebijakan fiskal serta moneter antarnegara, negara-negara dapat menantang dominasi ekonomi hegemon secara tidak langsung. Misalnya, inisiatif dedolarisasi, pembentukan lembaga keuangan multilateral non-Barat, serta penguatan forum diplomasi Selatan-Selatan yang merupakan bagian

dari strategi soft balancing dalam konteks global saat ini. Strategi ini juga mencakup upaya memperluas pengaruh institusi internasional non-hegemonik dan memperkuat konsensus antarnegara dalam forum multilateral untuk menciptakan tekanan kolektif terhadap negara dominan tanpa eskalasi militer. Berikut adalah beberapa karakteristik spesifik soft balancing yang mencakup:

1. Diplomasi mengikat melalui lembaga internasional
2. Penguatan ekonomi melalui kerja sama perdagangan dan investasi
3. Kerja sama militer terbatas
4. Pembentukan koalisi diplomatik guna meredam legitimasi dan pengaruh hegemon.

Setelah memahami karakteristik dari konsep soft balancing itu sendiri, penting untuk membedakannya dengan dua strategi utama lainnya dalam teori hubungan internasional, yaitu hard balancing dan bandwagoning. Hard balancing merupakan strategi penyeimbangan tradisional yang ditandai oleh penumpukan kekuatan militer, pembentukan aliansi pertahanan formal, dan perlombaan senjata untuk menghadapi ancaman dari kekuatan dominan (Paul, 2018). Sebaliknya, soft balancing menghindari konfrontasi militer langsung dan lebih mengandalkan instrumen non-militer seperti diplomasi, lembaga internasional, serta sanksi ekonomi (Pape, 2005). Brooks dan Wohlforth (2005) mengkritik bahwa strategi soft balancing terkadang dianggap tidak benar-benar menyeimbangkan karena tidak melibatkan kekuatan militer, meskipun tetap soft balancing memiliki tujuan strategis membatasi kebebasan bertindak hegemon. Di sisi lain, bandwagoning merupakan strategi yang berbeda secara mendasar. Walt (2005) menjelaskan

bahwa bandwagoning terjadi ketika negara memilih untuk menyesuaikan diri dan bergabung dengan kekuatan dominan, bukan menyeimbangkan, dengan harapan memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Perbedaan utama ketiga strategi penyeimbang ini terletak pada instrumen yang digunakan, yang mana hard balancing menggunakan kekuatan militer, soft balancing menggunakan mekanisme diplomatik dan ekonomi, sedangkan bandwagoning melibatkan akomodasi terhadap hegemon untuk kepentingan pragmatis. Sementara soft balancing menawarkan sarana non-militer untuk mengimbangi negara-negara kuat, itu bukan tanpa batasan karena efektivitas soft balancing tergantung pada konteks geopolitik spesifik dan kesediaan negara untuk terlibat dalam kerja sama multilateral. Selain itu, strategi ini dapat memicu pergeseran dalam dinamika internasional, seperti kekuatan dominan mencari jalan alternatif untuk menegaskan pengaruhnya, yang berpotensi merusak institusi yang terlibat (Feng & He, n.d.).

Dalam konteks kerja sama ekonomi dan keuangan, negara-negara BRICS menerapkan strategi soft balancing melalui serangkaian upaya dedolarisasi untuk menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Strategi ini diwujudkan melalui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, pembentukan institusi keuangan multilateral seperti New Development Bank (NDB), serta pengembangan sistem pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat dan sistem tradisional Barat. Zhang dan Liu (2025) menjelaskan bahwa diversifikasi mata uang dan peningkatan transaksi dalam mata uang lokal merupakan bagian dari strategi soft balancing ekonomi

BRICS. Bastanifar dkk. (2025) menilai bahwa kekuatan strategi ini terletak pada kemampuan BRICS membangun institusi keuangan baru yang memberikan alternatif terhadap dominasi ekonomi Barat. Nur Inna Alfiyah dkk. (2024) menambahkan bahwa inisiatif seperti penerbitan mata uang BRICS telah meningkatkan volume perdagangan tanpa keterlibatan dolar Amerika Serikat. Tomahi (2023) menekankan pentingnya koordinasi kebijakan ekonomi antaranggota dalam membentuk sistem keuangan alternatif yang lebih seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, Saputri (2025) menyatakan bahwa strategi dedolarisasi BRICS bertujuan menciptakan tatanan keuangan internasional yang lebih adil dan tidak bergantung pada satu mata uang dominan.

Konsep soft balancing memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, khususnya terkait implikasi kerja sama BRICS menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Konsep ini memberikan kerangka analitis dan teoretis yang komprehensif untuk memahami bagaimana negara-negara BRICS tidak secara langsung menantang hegemoni dolar Amerika Serikat melalui konfrontasi militer atau pembentukan aliansi formal, melainkan melalui pendekatan non-konfrontatif yang mencakup penggunaan kekuatan ekonomi, kerja sama institusional, serta pengembangan mekanisme finansial alternatif. Strategi seperti penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pembentukan JNDB, sistem pembayaran lintas batas, dan upaya dedolarisasi merupakan manifestasi konkret dari soft balancing yang diterapkan BRICS. Paul (2018) menegaskan bahwa soft balancing adalah strategi efektif bagi kekuatan menengah dan negara berkembang untuk menghadapi hegemoni tanpa

memicu konflik militer langsung. Bastanifar dkk. (2025) serta Papa & Han (2025) menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif BRICS mencerminkan bentuk perlawanan kolektif yang terkoordinasi dalam ranah ekonomi global, melalui institusi informal yang memungkinkan fleksibilitas tanpa eskalasi konflik.

Dalam konteks dominasi dolar Amerika Serikat, konsep soft balancing yang diusung BRICS memperlihatkan pergeseran strategi negara-negara berkembang dalam menghadapi tekanan struktural sistem internasional. Dibandingkan melakukan konfrontasi langsung atau membentuk aliansi militer, BRICS memilih jalur kooperatif dan diplomatik untuk mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan global yang berbasis dolar. Strategi ini relevan secara konseptual karena mencerminkan bentuk perimbangan kekuatan yang tidak konfrontatif, tetapi tetap bersifat menahan terhadap aktor hegemon.

Konsep soft balancing dalam konteks ini juga dapat dipahami sebagai respons strategis atas keterbatasan akses terhadap sumber daya global yang selama ini dikendalikan melalui sistem berbasis dolar. Dengan menciptakan ruang kerja sama yang bersifat horizontal dan tidak berbasis dominasi, negara-negara BRICS membangun struktur resistensi yang didasarkan pada kapabilitas ekonomi kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep soft balancing yang melihat pentingnya penggunaan alat ekonomi dan diplomatik sebagai sarana untuk menghadapi status quo tanpa menciptakan eskalasi langsung.

Dalam penelitian ini, soft balancing bukan hanya diposisikan sebagai strategi alternatif terhadap pendekatan tradisional yakni hard balancing, tetapi juga sebagai gambaran dari transformasi strategi negara-negara non-hegemon

dalam menavigasi sistem internasional yang tidak setara. Dengan kata lain, konsep ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana negara-negara BRICS secara sadar menghadapi dominasi dolar Amerika Serikat melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kooperatif, namun tetap bernuansa kompetitif.

Dengan demikian, konsep soft balancing tidak hanya membantu menjelaskan motivasi strategis di balik kerja sama BRICS, tetapi juga menjadi kerangka konseptual yang tepat untuk menganalisis strategi dinamika perimbangan kekuatan dalam sistem moneter internasional kontemporer oleh BRICS dan implikasinya terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama Peneliti	Output
1	Jurnal Volume 8 Nomor 1 (2017): 104-122 yang berjudul <i>The US Dollar as The Global Reserve Currency</i> , yang ditulis oleh Thomas Costigan, Drew Cottle, dan Angela Keys yang diterbitkan tahun 2017.	Penelitian ini mengkaji fondasi historis dan mekanisme yang mempertahankan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global. Studi ini menganalisis peran sistem Bretton Woods, petrodolar, dan jaringan keuangan internasional dalam memperkuat hegemoni dolar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi dolar tidak hanya didukung oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga oleh infrastruktur keuangan global yang telah terbangun selama puluhan tahun seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Penelitian ini memberikan landasan teoretis penting untuk memahami posisi dolar dalam sistem moneter internasional sebelum munculnya inisiatif dari BRICS (Brazil, Russia, India, China, South

No	Judul>Nama Peneliti	Output
		Africa).
2	Jurnal MISSY (Management and Business Strategy) Volume 5 Nomor 2 (2024): 75-81 yang berjudul <i>Upaya BRICS Dalam Mengimbangi Dominasi Dolar AS</i> , yang ditulis oleh Nur Inna Alfiah, Very Andrianingsih, Dessy Novitasari Laras Asih, dan Moh Baqir Ainun yang diterbitkan tahun 2024.	Studi ini menganalisis upaya BRICS dalam mengimbangi hegemoni dolar Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Penelitian ini mengungkap bahwa dominasi dolar Amerika Serikat telah memposisikan dolar sebagai mata uang referensi internasional dan menghasilkan ketimpangan yang sulit dibantah. Dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem ekonomi dunia sering kali menciptakan ketergantungan struktural negara-negara lain terhadap sistem keuangan Amerika. Temuan ini memperlihatkan bahwa negara-negara lain sering kali tidak memiliki kendali atas nilai tukar mata uang mereka sendiri ketika terjadi fluktuasi pada nilai dolar Amerika Serikat. Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang, kebijakan moneter Amerika Serikat, hingga sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, negara anggota BRICS berupaya mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan bilateral dan multilateral serta mencari alternatif baru demi melindungi kepentingan negara mereka. Upaya lainnya yang dilakukan BRICS untuk melepas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat juga dilakukan BRICS dengan mendirikan New Development Bank (NDB), dan juga Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang dikatakan bisa membuat bank sentral untuk dapat menyediakan likuiditas dalam mata uang asing kepada bank domestik mereka selama krisis keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada dolar. Penelitian ini juga menyebutkan adanya upaya realisasi dalam memutus ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam KTT

No	Judul>Nama Peneliti	Output
		BRICS ke-16 yang memperkenalkan mata uang BRICS dengan menampilkan bendera negara aliansi BRICS. Upaya-upaya dalam mengimbangi dominasi dolar Amerika Serikat tersebut dikatakan sebagai cerminan keinginan negara BRICS untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih adil, beragam dan juga untuk meningkatkan daya tawar BRICS di pasar internasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu mata uang, meskipun tantangan tetap ada dalam langkah-langkah tersebut.
3	Jurnal Transborders Volume 8 Nomor 1 (2024): 36-44 yang berjudul <i>BRICS: Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Global</i> , yang ditulis oleh Adrian Maulana Firmansyah, Muhammad Fawwaz Afif, Dudy Heryadi, dan Deasy Silvy Sari yang diterbitkan tahun 2024.	Penelitian ini mengkaji peran BRICS sebagai kekuatan alternatif dalam tata kelola global dan potensinya untuk merekonfigurasi arsitektur ekonomi internasional. Studi ini menganalisis evolusi BRICS dari forum dialog ekonomi menjadi platform kerja sama strategis yang menantang dominasi institusi Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BRICS memiliki potensi signifikan untuk menciptakan tatanan multipolar, meskipun masih menghadapi tantangan internal maupun eksternal seperti keragaman latar belakang dan kepentingan, dan kekuatan dominan negara Barat dalam tata kelola global. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang bagi BRICS dalam tata kelola global seperti peluang untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang dengan diikuti langkah untuk meningkatkan akses negara-negara berkembang ke pasar, investasi, dan teknologi, kemudian langkah, untuk mengubah tata kelola ekonomi global agar lebih adil dan inklusif, serta langkah untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, dan untuk peluang selanjutnya BRICS dapat mempromosikan multilateralisme. Penelitian ini juga memberikan

No	Judul>Nama Peneliti	Output
		pemahaman komprehensif tentang dinamika internal BRICS dan implikasinya terhadap stabilitas sistem internasional yang ada.
4	Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan Volume 2 Nomor 2 (2025): 53-61 yang berjudul <i>Strategi Dedolarisasi BRICS dalam Merespon Hegemoni Dolar AS di Pasar Keuangan Global</i> , yang ditulis oleh Wulan Margharetha Rema Saputri dan diterbitkan tahun 2025.	Studi ini menganalisis secara mendalam strategi-strategi konkret yang dikembangkan oleh negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai mekanisme dedolarisasi, termasuk promosi penggunaan mata uang lokal, pendirian sistem pembayaran alternatif seperti CIPS, kerja sama dalam pertukaran mata uang, dan pengembangan infrastruktur keuangan independen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya dedolarisasi menunjukkan progres yang signifikan, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis geopolitik, dan perbedaan kebijakan antar negara anggota yang kompleks. Penelitian ini memberikan wawasan praktis tentang mekanisme operasional yang dapat digunakan BRICS untuk menantang dominasi dolar Amerika Serikat.
5	Journal of Social Political Science Volume 4 Nomor 4 (2023): 421-436 yang berjudul <i>BRICS Against Hegemony of The United States Dollar in The International Monetary System</i> , yang ditulis oleh Najmi Firdaus, Sulistyo Widayanto, dan Irma Indrayani yang diterbitkan pada tahun 2023.	Penelitian ini secara khusus mengkaji konfrontasi langsung antara inisiatif BRICS dengan hegemoni dolar dalam sistem moneter internasional. Studi ini menganalisis berbagai instrumen yang dikembangkan BRICS, termasuk New Development Bank (NDB), Contingent Reserve Arrangement (CRA), dan rencana pembentukan mata uang bersama BRICS. Melalui pendekatan ekonomi politik internasional, penelitian ini mengevaluasi efektivitas strategi BRICS dalam menciptakan alternatif sistem moneter yang dapat menantang dominasi dolar secara substansial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terkait dedolarisasi,

No	Judul>Nama Peneliti	Output
		BRICS memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan pengaruh dolar Amerika Serikat agar dapat mencegah tindakan sepihak oleh Amerika Serikat. Pendirian NDB, penciptaan alternatif dari sistem pembayaran Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) yang didominasi Amerika Serikat seperti Cross-border Interbank Payment System (CIPS) milik Tiongkok dan Sistema Peredachi Finansovyykh Sobshchenly (SPFS) atau dalam bahasa Inggris disebut System for Transfer of Financial Messages milik Rusia, pengembangan sistem pembayaran BRICS Pay, dan agenda peluncuran mata uang BRICS telah berhasil menciptakan momentum untuk perubahan sistem moneter internasional dengan contoh implikasi langsung berupa adanya penurunan efektivitas sanksi Amerika Serikat terhadap lawan strategis seperti Rusia, meskipun masih memerlukan waktu untuk dapat menggantikan peran dominan dolar Amerika Serikat secara signifikan.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa studi-studi sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hegemoni dolar Amerika Serikat dan upaya BRICS dalam menciptakan alternatif sistem moneter internasional. Penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji berbagai aspek mulai dari fondasi historis dominasi dolar, mekanisme upaya dedolarisasi, hingga tantangan dan peluang BRICS dalam tata kelola ekonomi global.

Namun, terdapat beberapa celah penelitian yang dapat diidentifikasi dari tinjauan literatur di atas. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek teoretis dan konseptual, sementara analisis empiris terhadap dampak konkret kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar masih terbatas. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis implikasi dari perluasan keanggotaan BRICS yang mencakup Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, hingga Indonesia terhadap efektivitas strategi dedolarisasi. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dampak kerja sama BRICS dalam periode kontemporer (2023-2025) dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan geoekonomi terkini.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena akan menganalisis secara komprehensif dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dengan mempertimbangkan ekspansi keanggotaan terbaru dan perkembangan strategis dalam periode terkini. Lebih khusus lagi, penelitian ini akan fokus pada efektivitas strategi serta implikasi kerja sama BRICS dalam menghadapi hegemoni dolar melalui analisis terhadap mekanisme perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, penguatan institusi keuangan BRICS, dan pengembangan sistem pembayaran alternatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang ekonomi politik internasional, dengan menyediakan analisis empiris yang komprehensif tentang dinamika perubahan sistem moneter internasional dan implikasinya terhadap struktur kekuasaan global. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan tentang efektivitas strategi multilateral BRICS dalam menghadapi tantangan hegemoni ekonomi global.